RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2018 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dibuat merupakan merupakan amanah dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , yang diharuskan setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan RPJMD Kota Batam sesuai dengan Tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2018 ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam yang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan, maka proses penyusunan dilakukan secara sistematis yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif artinyanya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam Dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada Kita semua untuk terus berkarya lebih baik sehingga Visi Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai, yang pada akhirnya Visi Kota Kota Batam dapat terwujud.

Batam, Juni 2017
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam

NURZALIE, AP.S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP.19730206 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**

DAFTAR ISI ..... **II**

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2016) ... **3**

2.1. Anggaran dan Realisasi 3

2.2. Evaluasi Renja tahun lalu 5

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 19

3.1. Tujuan 22

3.2. Sasaran 23

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN **25**

4.1. Rencana Program dan Kegiatan 25

4.2. Tabel Renja TA.2018 34

BAB VI PENUTUP **37**

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka implementasi Otonomi Daerah sesuai dengan amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan daerah Kabupaten / Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Disamping itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus menganut prinsip dari, oleh dan untuk rakyat (*Community Based Development*).

Undang-undang Otonomi tersebut diatas merupakan tonggak dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayananSebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan didaerah sangat ditentukan oleh tingkat kualitas perencanaan. Dengan perencanaan, daerah menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah dimana dalam pelaksanaan pembanguanan daerah diperlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah.

Dalam rangka menyatukan persepsi dan rencana dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran harus mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RPJMD Kota Batam sesuai dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun Rencana Kerja Tahunan.

Mengingat peran dan fungsi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif dari seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Muatan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2018 berisi strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang berarti bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen Renstra ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN LALU (TAHUN ANGGARAN 2016)

1. ANGGARAN DAN REALISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan serta penyelenggaraan Pemerinntah Daerah yang baik, yang berorientasi kepada Pelayanan Umum, perlu adanya kebijaksanaan keuangan Daerah sesuai dengan Kaidah pengelolaan keuangan Publik yang efektif, efisien, trransparan dan bertanggung jawab.

Demi mewujudkan maksud dari Peraturan Daerah tersebut maka sangat diperlukan suatu Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah yang merupakan suatu proses berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit kerja untuk melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi demi menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung Program dan Kegiatan yang dilaksanakan SatuanPolisi Pamong Praja Kota Batam diperlukan Anggaran. Adapun anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2016 adalah sebesar

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Rp 27.242.169.880,00
2. APBD-Perubahah sebesar Rp 25.317.756.350,00

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
I	**Peningkatan pelayanan Keuangan daerah**				
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20.692.644.250,00	19.513.249.357,00	94.30	1.179.394.893,00
II	**Program Pembangunan Peningkatan Saranaa dan Prasarana perkantoran**				
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	396.650.000,00	388.020.000,00	97.82	8.630.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur				
	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0
	Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Satpol PP	0	0	0	0
III	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan**				
3	Kegiatan Penertiban Ruli dan Kili di Lahan Milik Pemerintah	821.975.100,00	810.014.500,00	98.54	11.969.000,00
4	Razia Terhadap Pelanggaran Daerah Kota Batam	548.650.000,00	545.050.000,00	99,34	3.600.000,00
5	Pengawasan Pelanggaran ketertiban dan Ketentraman umum	635.246.000,00	622.850.000,00	98,05	12.396.000,00
6	Pengamanan Tempat Hiburan Malam selama Bulan Ramadhan	596.975.000,00	591.250.000,00	99.04	5.725.000,00
7	Pengaman Objek Vital dan Strategis Pemerintah Kota Batam	1.294.530.000,00	1.248.150.000,00	96,42	46.380.000,00
8	Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)	179.756.000,00	179.000.000,00	99,58	756.000,00
9	Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas	151.330.000,00	143.430.000,00	94,78	7.900.000,00
		25.317.756.350,00	**24.041.013.857.00**		**1.276.742.493,00**

2. EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU (TA.2016)

Berdasarkan Anggaran dan Realisasi Kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing Evaluasi Kegiatan tersebut. Adapun Evaluasi dari Hasil Kegiatan dapat dilihat capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2016 sebagai berikut.

I. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Daerah

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian sasaran 1 Tahun 2016

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran.	1 Tahun	100%	100%	99,58%	100%	100%	94,30%

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan , maka pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam salah satu adalah Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja agar lebih efektif , handal, tangguh dan profesional. Untuk melaksanakanProgram dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja perlu didukung fasilitas administrasi Perkantoran , agar capaian program akan terlaksana untuk memberikan pelayanan dalam kenyaman masyarakat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih tangguh, tampil professional dan tepat sasaran dalam menjalankan tugas. Anggaran Kegiatan Administarasi Perkantoran mengalami penurunan anggaran, dari APBD Murni 2016 Rp20.698.054.250,00penurunanRp 5.410.000,00dengan total APBD Perubahan seluruhnya Rp20.692.644.250,00. Secara umum kegiatan ini telah terealisasi dengan baik sedangkan secara fisik keuangan hanya terserap sekitar Rp19.513.249.357.00 atau sekitar 94,30% (sembilan puluh empat koma tiga puluh persen).

Anggaran kegiatan Administarasi Perkantoran mengalami penurunan disebabkan adanya kegiatan sewa gedung dan sisa daya dan jasa .

II. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan PrasarnaPerkantoran Pemerintah

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Daerah

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Pencapaian sasaran 1 Tahun 2015

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Tahun	100%	100%	**90.02%**	100%	100%	**97.82%**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam salah satunya adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas dan dalam meningkatkan Kualitas PelayananPublik dengan pengadaan Belanja Modal, sejalan dengan perubahan StrukturOrganisasi dan Eselonisasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sesuai dengan Perda Nomor : 6 Tahun 2013. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan aktivitas selama ini masih menyewa ruko dan kondisi yang belum Representatif.

Anggaran kegiatan Sarana dan Prasarana Perkantoran anggaran, dari APBD Murni 2016 Rp440.990.430,00 penurunanRp44.340.4300,00 dengan total APBD Perubahan seluruhnya Rp396.650.000,00. Secara umum . Secara umum kegiatan ini telah terealisasi dengan baik sedangkan secara fisik keuangan hanya terserap sekitar Rp 396.650.000,00 atau sekitar 97,82% (sembilan puluh tujuh, koma delapan puluh dua persen).

Anggaran kegiatan Sarana dan Prasarana Perkantoran mengalami penurunan disebabkan adanya penurunan anggaran yang disebabkan oleh defisitnya APBD kota Batam Tahun 2016. Namun secara keseluruhan kegiatan ini dapat berjalan dengan optimal.

III. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Masyarakat

Sasaran Strategis:

Sosialiasi pada seluruh aparat tentang reformasi Birokrasi

3. Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah

Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar dilahan Milik Pemerintah

Pencapaian sasaran 1 Tahun 2016

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Berkurangnya rumah liar dan kios liar dilahan milik Pemerintah	Lokasi	12	12	93,53%	10	10	98,54 %

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan , maka pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam salah satu adalah Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menjalin kerjasama untuk penguatan koordinasi , pengawasan dan pengendalian.

Anggaran Penertiban Rumah dan Kios di Lahan Milik Pemerintah mengalami perubahan anggaran, dari APBD Murni Tahun 2016 Rp626.090.000,00 bertambah Rp195.885.100,00 dengan total seluruhnya menjadi Rp821.975.100,00,00 dengan target awal 7 (Tujuh) titik lokasi. Bertambah menjadi3 (tiga) dengan capaian kinerja berjumlah 10 (Sepuluh) titik lokasi dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 810.014.500,00 atau sekitar 98,54 % (sembilam puluhdelapan koma lima puluh empat persen).Bertambahnya tersebut disebabkan adamya penambahan titik lokasi Penertiban yang akan dilaksananakan.

Ada beberapa proyek/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam TahunAnggaran 2016.

1. Penertiban Kios Liar Row Jalan Pasir Putih sampai dengan Bundaran Perumahan Tropicana Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong.
2. Penertiban Kios Liar Lanjutan Jalan Pasir Putih sampai dengan Bundaran Perumahan Tropicana Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong.
3. Penertiban Kios Liar disimpang Frengki Kelurahan Teluk Tering dan Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota.

4. Penertiban Kios Liar di Simpang Kara Kelurahan Taman Baloi Kelurahan Teluk Tering dan Kelurahan Baloi PermaiKecamatan Batam Kota
5. Penertiban Rumah Liar dan Bangunan diatas Lahan Mesjid Raya Batam Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji.
6. Penertiban Kios Liar dan Bangunan Liar di Pulau Jalan Simpang Bule Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar
7. Penertiban Kios Liar (Buah) dan Kios Simpang Sari Jaya Hotel sampai dengan City Walk Nagoya Kecamatan Lubuk Baja
8. Penertiban Kios Liar dan Rumah Liar simpang Mitra Raya dan Row Jalan Dang Merdu Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota
9. Penertiban Ramah Liar dan Kios Liar sepanjang Row Jalan Perumahan Global Perumahan Serion dan Perumahan Villa Sempurna Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupng
10. Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Row Jalan Simpang Lampu Merah Aviari sampai Kantor Kecamatan Batu Aji.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Masyarakat

Sasaran Strategis:

Sosialiasi pada seluruh aparat tentang reformasi Birokrasi

4. Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)

Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)

Pencapaian sasaran 1 Tahun 2016

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Kebutuhan Pencegahan Terhadap penyakit masyarakat	Lokasi	15	15	99.13%	7	6	99,58%

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan , maka pernyataan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam salah satunya adalah untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menjalin kerjasama untuk penguatan Koordinasi , pengawasan dan pengendalian dan mewujudkan Koordinasi yang sinergis antar Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota Perlindungan Masyarakat, PPNS dan Aparatur lainnya.

Dalam rangka mewujudkan Kota Batam dan juga untuk mensukseskan Misi Pemerintah untuk mengembangkan Kota sebagai Bandar Modern berskala Internasional sebagai Kawasan Investasi yang dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan Industri besar, menengah kecil,koperasi usaha rumah tangga,industri pariwisata pusat perbelanjaan dan kuliner,hiburan perlu dilakukannya penertiban terhadap pengemis, anak-anak punk, Wanita Tuna Susila dan lainnya, hal ini bertujuan agar Investasi dan pendatang dari luar merasakan kenyamanannya saat berada di Kota Batam.

Anggaran Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) mengalami perubahan anggaran, dari APBD Murni Tahun 2016 sebesar Rp234.556.000,00 berkurang Rp54.800.000,00dengan total seluruhnya menjadi Rp179.756.000,00,00 dengan target awal 7 (Tujuh) kali pelaksanaan berkurang1 (Satu) kali pelaksanaan) dengan capaian fisik kinerja berjumlah 6 (Enam) kali pelaksanaan. Berkurangnya tersebut disebabkan oleh defisit anggaran Pemerintah Kota Batam.

Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat secara Realisasi Keuangan hanya terserap Rp179.000.000,00 atau sekitar 99,58 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Delapanpersen).

Adapun Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat yang telah dilaksanakan dalam mendukung Program Pemerintah di Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Tanggal 26 April 2016 dilaksanakan Operasi Pekat di daerah Kec.Lubuk Baja dan Kec. Batam Kota terjaring sebanyak 24 orang;
2. Tanggal 31 Mei 2016 dilaksanakan Operasi Pekat di daerah Kec.Batam Kota dan Kec.Batu Ampar Batam Kota terjaring sebanyak 22 orang;
3. Tanggal 29 juli 2016 dilaksanakan Operasi Pekat di daerah Kec.Lubuk Baja dan Kec.Lubuk Baja terjaring sebanyak 14 orang;
4. Tanggal 10 Oktober 2016 dilaksanakan Operasi Pekat di daerah Kec.Lubuk Baja dan Batu Ampar terjaring sebanyak 30 orang;
5. Tanggal 17Oktoberl 2016 dilaksanakan Operasi Pekat di daerah Kec.Lubuk Baja dan Kec. Batam Kota terjaring sebanyak 50 orang;
6. Tanggal 11 Nopember 2016 dilaksanakan Operasi Pekat di daerah Simpang Jam, Morning Bakeri dan Jodoh, Kec.Batu Ampar terjaring sebanyak 39 orang.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Masyarakat

Sasaran Strategis:

Sosialiasi pada seluruh aparat tentang reformasi Birokrasi

5. Kegiatan Razia Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam

Razia Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam
Pencapaian sasaran 1 Tahun 2016

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah Peraturan Daerah yang Telah Ditetapakan	Kali	16	16	96.95%	6 kali	6 Kali	99,34%

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan , maka pernyataan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam salah satunya adalah untuk Mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pelaksanaan Penegak Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Anggaran Razia terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2016 sebesarRp 612.250.000,00. Target kinerja pada kegiatan inimempunyai target berjumlah 6kali pelaksanaan di tahun 2016, namun selama tahun 2016 Target Kegiatan Razia Perda terlaksanahanya 6 (Enam) kali.Secara fisik keseluruhan kegiatan Razia Perda Kota Batam terlaksana di lapangan, secara keuangan hanya terserap sebesar Rp 548.850.000.00 atau sekitar 99,34 % (sembilan puluh Sembilan koma tiga puluh empat persen).

Adapun Pelaksanaan Razia Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan dalam mendukung Program Pemerintah di Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwako Nomor 3 Tahun 2015 tentangUsahan Warung Unternet.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Masyarakat

Sasaran Strategis:

Sosialiasi pada seluruh aparat tentang reformasi Birokrasi

6. Kegiatan Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pencapaian sasaran 1 Tahun 2016

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Masayarakat/badan Usaha yang melakukan Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99.88%	6 Bulan	6 Bulan	98.05%

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan , maka pernyataan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam salah satunya adalah untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menjalin kerjasama untuk penguatan Koordinasi , pengawasan dan pengendalian dan mewujudkan Koordinasi yang sinergis antar Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota Perlindungan Masyarakat, PPNS dan Aparatur lainnya.

Anggaran Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapatalokasi anggaran melalui APBD 2016 sebesar Rp1.285.296.000,00.Dan mengalami Perubahan AnggaranAPBD-P Tahun 2016 mernjadi Rp. 635. 246.000,00 .Kegiatan pengawasan Trantibum ini juga melibatkan instansi pendukung seperti TNI, POLRI,BP Batam dan instansi lainnya yang tergabung dalam Tim Terpadu Kota Batam.

Anggaran Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umummengalami perubahan anggaran, dari APBD Murni Tahun 2016 sebesar Rp. 1.285.296.000,00,00 berkurang Rp650.050.000,00dengan total seluruhnya menjadi Rp635.246.000,00,00 dengan target awal 12 (Dua Belas Bulan)kali pelaksanaanberkurang 6 (Enam) dengan capaian fisik kinerja berjumlah 6 (Enam) kali pelaksanaan. Berkurangnya tersebut disebabkan oleh defisit anggaran Pemerintah Kota Batam

Kegiatan Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum secara fisik dilapangan sudah terselesaikan. Sedangkan Secara Realisasi Keuangan hanya

terserap Rp 622.850.000,00 atau sekitar 98,05 % (sembilan puluh delapan koma nol limapersen).

Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum secara operasional dilapangan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertban Umum adalah dengan penertiban pedagang yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan seperti berjualan di Lokasi yang tidak diizinkan, serta pencegahan Pelanggaran lainnya yang dilaksanakan setiap hari dengan melalui patroli keliling pada jam kerja. Pada saat pengawasan banyak yang ditemukan dilapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam langsung memberikan teguran secara lisan kepada Badan Usaha/Masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Masyarakat

Sasaran Strategis:

Sosialiasi pada seluruh aparat tentang reformasi Birokrasi

7. Kegiatan Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam

Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam

Pencapaian sasaran 1 Tahun 2016

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah Unjuk Rasa yang bersifat anarkis yang telah dikendalikan	%	100%	100%	83,98%	100%	100%	96,42%

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan , maka pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam salah satu adalah adalah MeningkatkanKetertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, menjalin kerjasama untuk penguatan Koordinasi , pengawasan dan pengendalian.

Karateristik masyarakat Batam yang heterogen dengan multi kultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Batam yang sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang merupakan pintu gerbang wilayah barat dan lalulintas perdagangan internasional.

Kota Batam dapat dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di Kota ini. Letak yang sangat strategis ini memiliki implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya.

Namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Salah satunya adalah sering terjadi Demontrasi dari beberapa elemen masyrakat. Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Pelaksanaan Demontrasi dilakukan di kantor Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam dan di kantor-kantor instansi pemerintahan lainya.

Anggaran Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam mendapat alokasi anggaran melalui APBD 2016 sebesar Rp 1.611.080.000,000,00. Kegiatan pengamanan ini juga melibatkan instansi seperti TNI, POLRI, dan instansi lainnya.

Anggaran Kegiatan Objek Vital dan Tempat Strategis Kota Batam mengalami penurunan anggaran, dari APBD Murni 2016Rp1.611.080.000,00penurunanRp316.550.0000,00 dengan total APBD Perubahan seluruhnya Rp1.294.530.000,00. Secara umum kegiatan ini telah terealisasi dengan baik sedangkan secara fisik keuangan hanya terserap sekitar Rp1.248.150.000.00 atau sekitar 96,42% (sembilan puluh emam koma empat puluh dua persen).

Kegiatan Pengaman Objek Vital dan Strategis Pemerintah Kota Batam secara fisik dilapangan sudah terselesaikan dengan jumlah peristiwa sebanyak 33(Tiga Puluh Tiga) kali terjadi peristiwa unjuk rasa selama tahun 2016.

Adapun Pelaksanaan Kegiatan Objek Vital dan Tempat Strategis Kota Batam yang telah dilaksanakan dalam mendukung Program Pemerintah di Tahun 2016 sebagai berikut :

1.Demo dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
2.Demo dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
3. Demo Warga Sei Lekop Kecamatan Sagulung
4. Demo dari 2471 Guru Honor Belum Terima Gaji
5. Demo Himpunan Awak Trans Batam (Hantam) di Halte dengan PBK Kec-Skp.
7.Demo dari Pengangkut Sampah DKP Kecamatan Sekupang
8. Demo dari Warga Seilekop Kecamatan Sagulung
9. Demo dari Pengangkut Sampah DKP Kecamatan Sagulung
10. Demo dari Kampung Belian Batam Kota
11. Demo dari Heri Marhat, Aktivis dari LSM Laskar Anti Korupsi (LAKI)
12. Demo dari Gerakan Masyarakat Peduli Batam
13. Demo dari Gerakan Masyarakat Peduli Batam
14. DemoPimpDaerah Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa Banteng Indonesia
15. Demo dari Para Pelamar Satol PP
16. Demo dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
17. Demo Dari Federasi Serikat Metal Pekerja (FSPMI)
18. Demo dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
19. Demo dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ((FSPMI)
20. Demo dari Aliansi Rakyat Batam Bersatu Kota Batam
21. Demo dari Melayu Melawan
22. Demo dari Persatuan Pemuda Tempatan (PERPAT) Kota Batam
23. Demo dari Serikat Buruh FSPMI Kota Batam
24. Demo dari Gabungan Organisasi Islam Batam
25. Demo dari Lingkar Studi Mahasiswa Batam Progresif
26. Demo antisipasi unjuk rasa secara nasional
27. Demo dari Buruh Kegiatan
28. Demo dari Buruh Kegiatan
29. Pengaman Hari Jadi Kota Batam Ke – 197 mahasiswa kegiatan
30. Demo dari Aliansi Mahasiswa Kota Batam
31. Pengaman dalam rangka Hari Natal
32. Pengaman dalam rangka Kenduri Melayu Sedunia
33. Pengamanan dalam rangka menyambut Tahun Baru

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Masyarakat

Sasaran Strategis:

Sosialiasi pada seluruh aparat tentang reformasi Birokrasi

8. Kegiatan Pengawasan Tempat Hiburan Malam selama Bulan Ramadhan

Pengawasan Tempat Hiburan Malam selama Bulan Ramadhan

Pencapaian sasaran 1 Tahun 2016

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah Hari Pelaksanaan Pengawasan Tempat Hiburan Malam	hari	30 Hari	30 Hari	96.91%	30 Hari	30 Hari	99,04%

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan , maka pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam salah satu adalah adalah MeningkatkanKetertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, menjalin kerjasama untuk penguatan Koordinasi , pengawasan dan pengendalian.

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum selama bulan Ramadhan Satpol PP Kota Batam dalam pengawasan THM selama Bulan Suci Ramadhan menjalankan surat edaran Walikota Batam tentang Jam Buka dan Jam Tutup THM selama Bulan Suci Ramadhan didalam menjalankan tugas.

Satpol PP Kota Batam dan Tim Terpadu sering terkendala di lapangan sebagian tempat hiburan tidak mematuhi surat edaran Walikota, sehingga selama Bulan Suci Ramadhan banyak tempat hiburan diberikan surat teguran SP 1 dan SP2.

Kendala yang lain di lapangan adanya oknum-oknum yang mem-*back up* tempat hiburan tersebut sehingga mereka tetap buka dan tutup diluar jam yang telah ditentukan.

Kegiatan Pengawasan Tempat Hiburan Malam (THM) secara fisik dilapangan sudah terselesaikan selama 30 hari. Sedangkan Secara Realisasi Keuangan hanya terserap Rp596.975.000.00 dari anggaran Rp605.725.000.00 sekitar 99,04% (sembilan puluh sembilan koma nol empatpersen).

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Masyarakat

Sasaran Strategis:

Sosialiasi pada seluruh aparat tentang reformasi Birokrasi

9. Kegiatan Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas

Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas

Pencapaian sasaran 1 Tahun 2016

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah anggota Linmas yang terlatih	orang	70 orang	70 orang	96.66%	60 orang	60 orang	96.85%

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan , maka pernyataan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam salah satunya adalah untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menjalin kerjasama untuk penguatan Koordinasi , pengawasan dan pengendalian dan mewujudkan Koordinasi yang sinergis antar Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota Perlindungan Masyarakat, PPNS dan Aparatur lainnya.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan memasyarakatkan program sistem kemanan lingkungan (Siskamling) di kalangan masyarakat, sangat diperlukan pembinaan anggota Satlinmas yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan rakyat terlatih pada pengembangan daya tangkal bangsa dan negara, khususnya lingkungan masyarakat dengan maksud agar fungsi ketertiban umum, perlindungan, dan ketentraman masyarakat dapat lebih terjamin pelaksanaanya. Oleh karena itu keberadaan anggota Linmas sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Adapun pembinaan anggota Satlinmas pada tahun anggaran 2016 berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) orang.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan bahwa Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, maka peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mernpunyai posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu Satlinmas perlu terus diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, seperti antara lain Pemilihan Umum anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

Menghadapi dinamika dan tantangan tugas yang begitu berat, Satlinmas dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas yang kompleks sehingga perlu adanya dukungan dari masyarakat. Dalam menjalankan tugas Satlinmas perlu diberikan pengetahuan tentang arti pentingnya tugas anggota Satlinmas yang sebenarnya.

Kegiatan Pembinaan Siskamling dan HUT Satlinmas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp305.379.200,00. Secara fisik dilapangan sudah terselesaikan dilaksanakan. Sedangkan Secara Realisasi Keuangan hanya terserap Rp295.758.800,00dari anggaran Rp305.379.200.00 atau 96.85 % (sembilan puluh enam koma delapan puluh lima persen).

Adapun Pelaksanaan Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas untuk Tahun 2016 sebagai berikut :

Adapun dasar kegiatan Pembinaan siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas adalah DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam TA.216 dengan Nomor rekening kegiatan 1.19.1.19.26.016.024 sebagai berikut :

Pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan agar pembinaan siskamling dapat berjalan dengan baik sehingga peranan terutama dalam membantu keamanan dan ketertiban masyarakat di Korta Batam.Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan dan pembinaan angota Linmas yang berlokasi di Hotel King di Kampung Seraya pada tanggal Rabu-jum'at 18-20 Mei 2016 dengan jumlah Peserta berjumlah 60 (enam puluh) orang.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah dapat melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2016 dengan hasil cukup memuaskan. Dengan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 25.317.756.350,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dari APBD Pemerintah Kota Batam.

Terlaksananya good government merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan salah satu penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka memberikan Pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi yang telah dijabarkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun2011-

2016 untuk menetapkan Prioritas program dan kegiatan pembangunan melalui sumber dana APBD maupun dana dari APBN.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, isi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka disusunlah visi kota batam Tahun 2016-2021. Adapun visi tersebut adalah:

"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing , Maju, Sejahtera dan Bermartabat"

VISI

Visi Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan gambaran saat ini tentang keadaan organisasi di masadepan, yang realistis dan ingin diwujudkan oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu.Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yaitu :

"Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penegakan Peraturan Daerah Serta Perlindungan Masyarakat Kota Batam"

Visi diatas merupakan cerminan dan cara pandang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang proaktif terhadap perubahan internal maupun eksternal dalam rangka menghadapi tantangan dimasa mendatang dan menuju kondisi yang diinginkan. Visi tersebut mengandung arti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diharapkan mampu menjadi institusi yang berintegritas, tangguh dan kredibel dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional yang mampu membawa Aparatur Pemerintahan yang professional, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

MISI

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi yang merupakan sesuatu yang dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengenal instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan ikut berperan dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun Misi Pertama Walikota Batam yang terpilih 2016-2021 yang **:**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi"

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setip pekerjaan, serta tidak membedakan status pekerjaan dari warganya.Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Yang harus dipertanggung jawabkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, disamping mendukung dan menjadi bagian dari ke empat misi lainnya. Sejalan visi yang telah ditetapkan , maka misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam mendukung pencapaian Misi Walikota dan wakil Walikota Batam Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja agar lebih efektif , handal, tangguh dan profesional;
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas;
3. Meningkatkan ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat menjalin kerjasama untuk penguatan Koordinasi, pengawasan dan pengendalian;
4. Mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pelaksanaan Penegak Perda dan Keputusan Kepala Daerah;
5. Mewujudkan Koordinasi yang Sinergis antar Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur Instansi Terkait Lainnya.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan dalam beberapa Misi sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang memiliki tigas pokok dan fuingsi sebagai aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota Batam dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum , menegakkan Peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya serta melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pembangunan Kota Batam yang berkualitas. Keberhasilan mengahasilkann keluaran (output) yang berkualitas sangat ditentukan oleh penyelenggaraan proses pembangunan yang bersifat partisipatif dan antisipatif dimana ketertiban aktif seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan di Kota Batam merupakan syarat penting *(necessary condition)* yang harus dipenuhi.
2. Proses Pembangunan di Kota Batam yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat umum baik yang disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Kota Batam maupun atau melalui perwakilan dilembaga legislatif seyogyanya difasilitasi sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas sehingga proses pencapain kinerja dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali atas dukungan dari sumber daya proses manusia (aparatur) yang berkualitas. Hal ini mengingat kedudukan Strategis Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai barisan terdepan pada Pemerintah Kota Batam dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta sebagai pelaksana langsung dalam hal penegakan peraturan daerah. Dengan demikian , maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam akan melakukan berbagai upaya secara berkelanjutan untuk mewujudkan aparatur yang tangguh , trampil, profesional dan aspiratif dengan kualitas kinerja yang tinggin melalui berbagai kesempatan pendidikan dan pelatihan, yang meliputi pendidikan formal non formal, tehknis dan struktural yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat.
4. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan etika politik

masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai – nilai luhur agama dan budaya bangsa.

5. Mewujudkan ketahanan dan kesiagaan masyarakat dari segala bentuk ancaman dan bencana.Mewujudkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam yang profesional, Bersih dan Berwibawa yang didukung sikap mental dan prilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma Hukum dan Agama.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

1. Tujuan

Tujuan dan Sasaran merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) apa yang akan dicapai/dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Untuk tercapainya Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kebeberapa program dan kegiatan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala Daerah Terpilih terebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dimana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 termasuk dalam Misi 1 (Satu) yaitu :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi"

Tujuan 1 yaitu :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Bersih

Tujuan 2 yaitu :

Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan masyarakat dalam Penerapan Produk Hukum

Tujuan dan Sasaran merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) apa yang akan dicapai/dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Untuk tercapainya Visi

dan Misi kepala Daerah yang terpilih Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kebeberapa program dan kegiatan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan .

Tujuan 1 yaitu :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Bersih

Tujuan dari **rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam** adalah sebagai berikut ;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Bersih dan Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat dalam Penerapan Produk Hukum melalui Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, handal dan tangguh dalam pelaksanaan tugas;
2. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum serta Penetapan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Terwujudnya hubungan Kerjasama yang baik dengan Dinas/Instansi terkait dan Aparat dalam pelaksanaan tugas;
4. Tersedianya tenaga Perlindungan Masyarakat yang terlatih, trampil dan handal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indicator Kinerja Sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tersebut. Selain sasaran merupakan penjelasan dari tujuan secara terukur, yaitu hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kemudian sesuai dengan rencana strategis. Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan spesifikasi, terinci dan terukur sehingg tujuan dapat memberikan spesifikasi,

terinci dan terukur sehingga tujuan dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Sasaran **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam** adalah sebagai berikut ; Berkurangnya Praktik KKN dilingkungan Birokraasi dan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dan Aparatur terhadap Hukum dengan melalui :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;
2. Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan lingkungan;
3. Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah – tengah kehidupan masyarakat.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Rencana Program dan Kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam maka Satuan Polisi Pamong Praja telah mengalami Perubahan Strutur Organisasi serta Eselonisasi di Satuan Polisi Pamong Praja. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dengan demikian Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamang Praja Kota Batam beberapa program /kegiatan bertambah.

Program dan kegiatan Tahun 2016-2021 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam disusun dengan pertimbangan kebutuhan ditengah masyarakat. Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai berikut :

Dalam rangka mewujudkan Program – Program sebagaimana tersebut diatas, akan dilakukan beberapa Kegiatan yang meliputi :

1. **Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah.**

   1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja perlu didukung fasilitas administrasi Perkantoran , agar capaian program akan terlaksana untuk memberikan pelayanan dalam kenyaman masyarakat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih tangguh, tampil professional dan tepat sasaran dalam menjalankan tugas.

Indikator Kinerja	:	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam.
Tujuan	:	Mewujudkan pemerintaha yang profesional, akuntabel, bersih dan transparan.
Sasaran	:	Terwujudnya kelembagaan dan ketetalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkualitas.
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp18.971.288.434,00 (Delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
Sumber Dana	:	APBD

2. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana danPrasarana Perkantoran Pemerintah.

2. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

Untuk melaksanakan Program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja perlu didukung dengan sarana dan prasarana perkantoran. Hal ini sejalan dengan Perubahan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam maka sarana prasarana perkantoran sangat mendukung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja	:	Meningkat dan terpeliharanya sarana & prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran PD.
Tujuan	:	Mewujudkan pemerintaha yang profesional, akuntabel, bersih dan transparan.
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp. 529.188.226,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan dua ratus dua puluh enam rupiah)
Sumber Dana	:	APBD.

Indikator Kinerja	:	Meningkat dan terpeliharanya sarana & prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran PD.
Tujuan	:	Mewujudkan pemerintaha yang profesional, akuntabel, bersih dan transparan.
Lokasi	:	Kota Batam

Dana	:	Rp4.572.651.900,00 (Empat Milyar lima ratus tujuh puluh dua enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)
Sumber Dana	:	APBN.

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarkat.

1. Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah.

Tingginya migrasi dari luar Kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu disediakan oleh pihak pengelola kawasan industri,dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam mencari pekerjaan akibatnya mereka menempuh mendirikan bangunan dilahan kosong untuk tempat tinggal dan mendirikan kios dijalan.

Indikator Kinerja	:	Berkurangnya Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah
Tujuan	:	Meningkatnya peranan Pemerintah Dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat.
Sasaran	:	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp526.501.200,00 (Lima ratrus dua puluh enam juta lima ratus satu ribu dua ratus rupiah)
Sumber Dana	:	APBD

2. Penataan dan Pendataan Rumah Liar dan Kios Liar di Daerah Milik Jalan Se-Kota Batam.

Tingginya migrasi dari luar Kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu disediakan oleh pihak pengelola kawasan industri,dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam mencari pekerjaan

akibatnya mereka menempuh mendirikan bangunan dilahan kosong untuk tempat tinggal dan mendirikan kios di jalan.

Indikator Kinerja	:	Terlaksananya Penataan Rumah Liar dan Kios Liar di Daerah Milik Jalan Kota Batam
Tujuan	:	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Sasaran	:	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp0,00 (Nol rupiah)
Sumber Dana	:	APBD

3. Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum perlu dilakukaan agar menimalisir pelaku-pelaku usaha yang melanggar ketertiban umum. Kegiatan Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertban Umum adalah dengan penertiban pedagang yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan seperti berjualan di Lokasi yang tidak diizinkan, serta pencegahan Pelanggaran lainnya yang dilaksanakan setiap hari dengan melalui patroli keliling pada jam kerja. Pada saat pengawasan banyak yang ditemukan dilapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam langsung memberikan teguran secara lisan kepada Badan Usaha/Masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut.

Indikator Kinerja	:	Terlaksananya pengawasan Pelanggaran ketentraman dan Ketertiban Umum
Tujuan	:	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Sasaran	:	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp0,00 (Nol rupiah)
Sumber Dana	:	APBD

4. Pengaman Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam

Karateristik masyarakat Batam yang heterogen dengan multi kultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Batam yang sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang merupakan pintu gerbang wilayah barat dan lalulintas perdagangan internasional.

Kota Batam dapat dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di Kota ini. Letak yang sangat strategis ini memiliki implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya.

Namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Salah satunya adalah sering terjadi Demontrasi dari beberapa elemen masyrakat. Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Pelaksanaan Demontrasi dilakukan di kantor Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam dan di kantor-kantor instansi pemerintahan lainya.

Indikator Kinerja	:	Terlaksananya pengawasan unjuk rasa yang mengarah tindakan anarkis
Tujuan	:	Meningkatkanya peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat
Sasaran	:	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp366.500.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah rupiah)
Sumber Dana	:	APBD

5. Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum selama bulan Ramadhan

Satpol PP Kota Batam dalam pengawasan THM selama Bulan Suci Ramadhan menjalankan surat edaran Walikota Batam tentang Jam Buka dan Jam Tutup THM selama Bulan Suci Ramadhan didalam menjalankan tugas.

Satpol PP Kota Batam dan Tim Terpadu melakukan pengawasan Temapt Hiburan Malam selama bulan Suci Ramadhan sesuai edaran Walikota, agar masyarakakat khusuk melaksanakan ibadah. Dalam pelaksanaan selama Bulan Suci Ramadhan banyak tempat hiburan diberikan surat teguran SP 1 dan SP2.

Kendala yang lain di lapangan adanya oknum-oknum yang mem-*back up* tempat hiburan tersebut sehingga mereka tetap buka dan tutup diluar jam yang telah ditentukan/

Indikator Kinerja	:	Terlaksananya Pengawasan Tempat Hiburan Selama Bulan Suci Ramadhan
Tujuan	:	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Sasaran	:	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp170.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah)
Sumber Dana	:	APBD

6. Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah

Kota Batam adalah Kota yang memiliki penduduk lebih kurang 1,3 Juta Jiwa serta memiliki latar belakang yang berbeda baik dari segi suku, umur, pendidikan serta agama dimana jumlah terus bertambah setiap tahunnya. Tentu saja hal tersebut sangat mempengaruhi terahadap kepatuhan masyarakat aka peraturan daerah yang berlaku di Kota Batam. Maka Tujuan dari kegiatan ini dimaksudkan agar meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Produk Hukum Daerah sehingga tercipta estetika kota yang rapi, ketentraman dan ketertibsn umum di Kota Batam.

Indikator Kinerja	:	Terlaksananya Operasi Yustisi terhadap Peraturan Daerah
Tujuan	:	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum

Sasaran	:	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp159.900.000,00 (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
Sumber Dana	:	APBD

7. **Sosialisai dan Penyuluhan Terhadap Peraturan Daerah yang Berlaku di Kota Batam.**

Tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan ini dimaksudkan sebagai upaya penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Produk Hukun lainnya seperti Perwako yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Standar Operasional pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Diharapkan dengan adanya upaya pencegahan ini akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan Daerah demi lancaranya pembangunan Kota Batam .

Indikator Kinerja	:	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Perda yang Berlaku di Kota Batam
Tujuan	:	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Sasaran	:	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp158.400.000,00 (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
Sumber Dana	:	APBD

8. **Pembinaan Siskamling dan Peringatan Hut Satlinmas**

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan memasyarakatkan program sistem kemanan lingkungan (Siskamling) di kalangan masyarakat, sangat diperlukan pembinaan anggota Satlinmas yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan rakyat terlatih pada pengembangan daya tangkal bangsa dan negara, khususnya lingkungan masyarakat dengan maksud agar fungsi ketertiban umum, perlindungan, dan ketentraman masyarakat dapat lebih

terjamin pelaksanaanya. Oleh karena itu keberadaan anggota Linmas sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan bahwa Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, maka peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu Satlinmas perlu terus diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, seperti antara lain Pemilihan Umum anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menghadapi dinamika dan tantangan tugas yang begitu berat, Satlinmas dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas yang kompleks sehingga perlu adanya dukungan dari masyarakat. Dalam menjalankan tugas Satlinmas perlu diberikan pengetahuan tentang arti pentingnya tugas anggota Satlinmas yang sebenarnya.

Indikator Kinerja	:	Terlaksananya pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas.
Tujuan	:	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Sasaran	:	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

9. Kegiatan Sosialiasi Penyelenggaraan Linmas

Satlinmas mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan lingkungan, tugas sebagai Satlinmas merupakan tugas yang berat dan mulia yang menuntut pengabdian yang tidak mengenal waktu serta pantang menyerah. Oleh karena

itu sangat diperlukan penanganan pengelolaan linmas yang baik, terarah dan terkoordinir sehingga penyelenggaraan linmas dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi linmas di masyarakat.Penyelenggaraan linmas dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan aparatur pemerintah yang memahami peraturan tentang penyelenggaraan linmas.

Indikator Kinerja	:Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Linmas
Tujuan	: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat *terhadap hukum*
Sasaran	: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	: Kota Batam
Dana	: Rp376.468.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Sumber Dana	: APBD

10. Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Linmas dalam Penanggulangi Risiko Bencana

Untuk meningkatkan peran serta anggota Satlinmas sesuai tugas pokok, fungsi dan perannya sebagai perlindungan masyarakat, sangat diperlukan tenaga yang *mempunyai keahlian dan ketrampilan yang memadai.Untuk* mendapatkan tenaga satlinmas yang mempunyai keahlian dan keterampilan perlu pelatihan yang terarah.Pelatihan bagi anggota satlinmas perlu berkesinambungan sebagai usaha peningkatan sumber daya manusia anggota linmas.

Indikator Kinerja	: Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM Linmas.
Tujuan	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Sasaran	: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	: Kota Batam
Dana	: Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
Sumber Dana	: APBD

2. Tabel Rencana Kerja Operasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2018

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) OPERASI PERANGKAT DAERAH (OPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2018

NO	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM RPJMD	RENCANA REALISASI TAHUN 2017	TAHUN ANGGARAN 2018			
				KEGIATAN	VOLUME	DANA (Rp)	LOKASI
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah kota Batam	100%	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp18.971.288.434,00	Kota Batam
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Batam	100%	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp529.188.266,00	Kota Batam
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	• Pengadaan Kendaraan Dalmas	5 unit	Rp2.124.500.000,00	Dana APBN (DAK)
				• Pengadaan Kendaraan Patroli/Roda 4 Double Cabin	3 unit	Rp1.822.650.000,00	Dana APBN (DAK)
				• Pengadaan Kendaraan Angkut/Mini Bus	1 unit	Rp625.501.900,00	Dana APBN (DAK)

3	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	Jumlah penegakan Perda	10 kali	3. Penertiban Ruli dan Kili di Lahan Milik Pemerintah	12 Kali	Rp526.501.200,00	Kota Batam
			0	4. Penatan dan Pendataan Ruli dan Kili di Daerah Milik Jalan se-kota Batam	10 Titik	Rp0,00	Kota Batam
			0	5. Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	Rp0,00	Kota Batam
			12 kali	6. Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	19 kali	Rp159.900.000,00	Kota Batam
			0	7. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	720 Orang	Rp158.400.000,00	Kota Batam
			25 hari	8. Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	30 hari	Rp170.000.000,00	Kota Batam
			33 kali	9. Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Pemerintah Kota Batam	25 kali	Rp366.500.000,00	Kota Batam
			60 orang	10. Pembinaan Siskamling dan Peringatan Hut Satlinmas	120 Orang	Rp280.000.000,00	Kota Batam
			0	11. Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Linmas	120 Orang	Rp376.468.000,00	Kota Batam
			0	12. Kegiatan Pelatihan	101 Orang	Rp210.000.000,00	Kota Batam

				Peningkatan Sumber Daya Linmas Dalam Penanggulangan Risiko Bencana			
					Jumlah	**Rp26.320.897.760.00**	

Batam, Maret 2017
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam

NURZALIE, AP. S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP.19730206 199311 1 001

BAB V
PENUTUP

Berbagai upaya pembangunan telah dilaksanakan untuk mendukung visi Pemerintah Kota Batam sebagai Bandar dunia yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan bermartabat. Kemajuan pembangunan di berbagai bidang telah dicapai, dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, namun dalam mencermati kondisi, potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki, mengharuskan seluruh masyarakat bersama dengan Pemerintah Kota Batam harus mengambil langkah-langkah, guna terus menata ulang berbagai bentuk kebijaksanaan agar lebih diarahkan pada upaya pemulihan situasi dan kondisi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan dalam melakukan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Dengan ditetapkanya Rencana Kerja Operasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 ini, diharapkan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang semakin lebih baik.

Demikian rencana Kerja Operasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, untuk dapat dijadikan sebagai Panduan dan Arahan dalam melaksanakan tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Batam, Juni 2017
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam

NURZALIE, AP.S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP.19730206 199311 1 001